

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasar hasil penelitian mengenai solusi orangtua terhadap pembelajaran daring anak SD pada masa pandemik Covid-19 di Desa Rambung Merah Kecamatan Siantar, maka diambil kesimpulan:

1. Pembelajaran daring bukanlah hal yang tabu bagi orangtua. Pembelajaran daring adalah pembelajaran yang dilakukan antara guru dan siswa, namun sebenarnya adalah pembelajaran yang hanya memberikan tugas dan orangtua diharuskan berperan aktif dalam mengikuti pembelajaran.
2. Orangtua mempunyai hambatan dalam proses pembelajaran daring seperti menguasai materi atau menguasai pembelajaran yang diberikan pihak sekolah sehingga pembelajaran daring tidak maksimal. Selain kurang memahami materi ajar, keterbatasan lain menyangkut pembelajaran daring mencakup, pendidikan orangtua yang kurang memandai, keterbatasan kuota internet, kewajiban memiliki laptop atau minimal android, alokasi waktu untuk mendampingi anak, termasuk sinyal atau jaringan internet yang lambat.
3. Pembelajaran daring bukan salah satu kewajiban yang harus dilakukan pihak sekolah, tetapi tuntutan untuk keberlangsungan anak dalam menempuh pendidikan. Orangtua mempunyai solusi tersendiri untuk

keberlangsungan pembelajaran daring, dimana harus ikut untuk mendampingi anaknya dalam pembelajaran dari sekolah.

5.2 Sarans

Berdasar kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan poin fundamental menyangkut implementasi pembelajaran daring yang lebih baik, antara lain;

1. Menciptakan pembelajaran yang “adil”, yaitu pembelajaran yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa.
2. Guru perlu saling berkoordinasi dengan sesama guru. Banyaknya tugas membuat siswa semakin terbebani bahkan stres.
3. Orangtua harus memberikan edukasi tentang penggunaan handphone, Untuk itu orangtua harus sedekat mungkin dengan anaknya saat proses pembelajaran berlangsung. Jadi, jika anak mengalami kesulitan, orangtua bisa langsung membantunya.
4. Pemerintah seharusnya tidak sepenuhnya memberikan kewajiban kepada sekolah dan operator. Koordinasi dengan dinas pendidikan daerah juga perlu dilakukan secara rutin. Hal yang sama berlaku untuk pengawas, Seharusnya isu pemberian “kuota” yang belum adil bisa menjadi pembahasan utama di meja rapat dinas pendidikan